

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG PENDAFTARAN SELEKSI CALON ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Ombudsman Republik Indonesia mengundang Putera-Puteri terbaik Warga Negara Indonesia yang berintegritas, cerdas, dan gigih untuk mengabdi dan membangun karier serta mengawal pelayanan publik yang bebas maladministrasi untuk mengisi formasi sebagai berikut:

I. FORMASI JABATAN

Formasi jabatan pada tiap unit penempatan dapat dilihat pada lampiran I.

II. PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENDAFTARAN:

1. Persyaratan

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Bebas dari segala bentuk narkotika dan obat-obatan terlarang;
- e. Cakap, jujur, memiliki integritas moral, memiliki kapabilitas dan memiliki reputasi yang baik;
- f. Berusia paling rendah 22 (dua puluh dua) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun per 1 Juni 2022;
- g. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan (S-1/D-IV atau S-2) dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol), dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri yang Program Studinya terakreditasi A/Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat kelulusan. Jika tidak tertulis dalam ijazah maka dibuktikan dengan surat keterangan dari fakultas **atau** tangkap layar (*screen capture*) Direktori Hasil Akreditasi Program Studi/Perguruan Tinggi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang memuat status akreditasi berasal dari portal https://banpt.or.id

atau surat akreditasi yang dimiliki perguruan tinggi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. Bagi pelamar Perguruan Tinggi Luar Negeri harus mendapatkan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;

- h. Mampu mengoperasikan komputer minimal program Microsoft Office;
- Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
- j. Bersedia tidak merangkap dalam jabatan pegawai negeri, anggota partai politik, advokat, serta profesi lainnya.

2. Ketentuan Pendaftaran

- a. Pengumuman ditayangkan melalui tautan https://ombudsman.go.id/pengumuman.
- b. Pendaftaran dilakukan secara online melalui tautan https://calasori.ombudsman.go.id (dihimbau agar pelamar melakukan proses pendaftaran menggunakan PC/laptop). Periode pendaftaran seleksi dimulai pada tanggal 14 Februari 2022 s.d. 7 Maret 2022.
- c. Pelamar wajib mengisi data diri dengan benar dan mengunggah dokumen kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan.
- d. Dokumen kelengkapan administrasi yang perlu diunggah sebagai berikut:
 - 1) Surat Lamaran (format file *pdf*, maksimal 500 KB, dapat diunduh pada tautan pengumuman pendaftaran);
 - 2) Daftar Riwayat Hidup (format file *pdf*, maksimal 500 KB, dapat diunduh pada tautan pengumuman pendaftaran);
 - 3) Pasfoto terbaru ukuran (4x6) berwarna dengan latar belakang biru (format file *ipeg/ipg*, maksimal 500 KB);
 - 4) Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (format file *pdf*, maksimal 500 KB);
 - 5) Asli ijazah pendidikan dengan strata pendidikan S-1/D-IV atau S2. Bagi Pelamar Perguruan Tinggi Luar Negeri wajib melampirkan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

- bidang pendidikan tinggi (dijadikan dalam 1 (satu) file *pdf*, maksimal 1 MB);
- Asli transkrip nilai pendidikan dengan strata pendidikan S-1/D-IV atau S2. Bagi Pelamar Perguruan Tinggi Luar Negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi (dijadikan dalam 1 (satu) file *pdf*, maksimal 1 MB);
- 7) Asli surat keterangan akreditasi program studi atau tangkapan layar (screen capture) Hasil Akreditasi Perguruan Tinggi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang memuat status akreditasi berasal dari portal https://www.banpt.or.id (format file pdf, maksimal 500 KB);
- 8) Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku (format file *pdf*, maksimal 500 KB);
- 9) Asli Surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup (Rp10.000), bahwa tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun (format file *pdf*, maksimal 500 KB, dapat diunduh pada tautan pengumuman pendaftaran);
- 10) Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah (format file *pdf*, maksimal 500 KB);
- 11) Asli Surat Keterangan Sehat Rohani dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah (format file *pdf*, maksimal 500 KB) **disampaikan pada saat pelamar dinyatakan lulus pada psikotes**;
- 12) Asli Surat Keterangan Bebas Narkotik dan Zat Adiktif lainnya dari Badan Narkotika (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota) (format file *pdf*, maksimal 500 KB) disampaikan pada saat pelamar dinyatakan lulus pada psikotes;
- 13) Bagi Pelamar penyandang Disabilitas yang melamar dalam formasi disabilitas melampirkan syarat tambahan berupa Surat Keterangan Dokter yang berlaku dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya (format file *pdf*, maksimal 500 KB);

- 14) Asli Surat Pernyataan Tidak Mengundurkan Diri diatas kertas yang bermaterai cukup (Rp10.000) (format file *pdf*, maksimal 500 KB, dapat diunduh pada tautan pengumuman pendaftaran);
- 15) Asli Surat Pernyataan Tidak Mengajukan Penyesuaian Ijazah diatas kertas yang bermaterai cukup (Rp10.000) (format file *pdf*, maksimal 500 KB, dapat diunduh pada tautan pengumuman pendaftaran);
- Asli Surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup (Rp10.000), bahwa bersedia untuk tidak merangkap sebagai anggota Partai Politik, Advokat, serta profesi lainnya (antara lain: Dokter, Akuntan, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah), apabila yang bersangkutan diterima sebagai Calon Asisten (format file pdf, maksimal 500 KB, dapat diunduh pada tautan pengumuman pendaftaran);
- 17) Asli Surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup (Rp10.000), bahwa seluruh informasi dan dokumen yang disampaikan merupakan dokumen asli yang sah dan dapat dibuktikan keasliannya (format file *pdf*, maksimal 500 KB, dapat diunduh pada tautan pengumuman pendaftaran).
- e. Dokumen yang diunggah dapat dibaca dan dipahami dengan jelas serta merupakan hasil pindai (*scan*) dari dokumen asli sebagaimana layaknya dokumen, bukan merupakan hasil foto dari dokumen tersebut. Dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dan tidak dapat dipahami dengan jelas, tidak akan diproses.
- f. Batas waktu unggah dokumen kelengkapan administrasi paling lambat pada tanggal 7 Maret 2022 pukul 24.00 WIB. Unggah dokumen kelengkapan administrasi yang diterima melewati batas waktu tersebut tidak akan diproses.
- g. Proses pendaftaran wajib dilakukan dengan mengisi data diri dan mengunggah seluruh dokumen kelengkapan administrasi pada tautan sebagaimana dimaksud pada huruf b. Pelamar yang tidak mengisi data diri dan/atau tidak mengunggah seluruh dokumen kelengkapan administrasi pada tautan sebagaimana dimaksud pada huruf b maka dinyatakan tidak mengikuti proses pendaftaran seleksi.

III. TAHAPAN SELEKSI

Jadwal dan tahapan kegiatan dapat dilihat pada lampiran II, namun sewaktu-waktu dapat berubah dan akan diumumkan melalui website www.ombudsman.go.id.

IV. KETENTUAN PENUTUP

- 1. Dokumen kelengkapan administrasi yang akan diproses adalah dokumen yang lengkap dan diterima sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
- 2. Pelamar tidak diperkenankan untuk melakukan pendaftaran secara berulang atau lebih dari 1 (satu) kali. Pelamar wajib memastikan bahwa dokumen yang diunggah adalah dokumen kelengkapan administrasi sesuai dengan yang dipersyaratkan.
- 3. Pendaftaran yang sah dilakukan dengan mengisi data dan proses unggah dokumen dengan lengkap secara *online* dan memenuhi batas waktu periode pendaftaran.
- 4. Semua biaya (transportasi, akomodasi, dan lain-lain) yang dikeluarkan oleh peserta ujian dalam rangka mendaftarkan diri dan mengikuti ujian seleksi menjadi tanggungan peserta.
- 5. Tim Seleksi Calon Asisten Ombudsman Republik Indonesia tidak mengadakan surat-menyurat dan tidak mengenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun kepada peserta. Ombudsman Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Ombudsman Republik Indonesia atau Tim Seleksi.
- 6. Bagi pelamar yang merasa dirugikan karena adanya pungutan atau tawaran sebagaimana dimaksud pada angka 5, agar melaporkan kepada Ombudsman Republik Indonesia melalui kanal pengaduan yang tersedia.
- Setiap perkembangan informasi Seleksi ini disampaikan melalui situs Ombudsman Republik Indonesia dengan alamat <u>www.ombudsman.go.id</u>. Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab peserta.
- 8. Panitia Seleksi berhak membatalkan hasil seleksi selama proses seleksi terbuka apabila ditemukan kondisi sebagai berikut:
 - a. pelamar telah memberikan data/keterangan tidak benar;
 - b. pelamar mengkonsumsi zat adiktif dan psikotropika (narkotika dan obatobatan terlarang);

- c. pelamar terbukti pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- 9. Dokumen kelengkapan administrasi yang dikirimkan kepada Ombudsman Republik Indonesia sebelum periode pendaftaran dianggap tidak berlaku.
- 10. Dokumen kelengkapan administrasi yang telah diterima panitia menjadi milik panitia.
- 11. Keputusan Tim Seleksi bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.
- 12. Informasi lebih lanjut terkait Seleksi Calon Asisten dapat menghubungi Sekretariat Panitia Seleksi melalui nomor telepon: 021 225 137 137 ext 1185 atau melalui email rekrutmen@ombudsman.go.id.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Februari 2022 Tim Seleksi Calon Asisten Ombudsman RI

Ketua,

#

Leni Milana

Lampiran I Pengumuman Nomor 1 Tahun 2022 Tanggal : 10 Februari 2022

Kantor Pusat

						Kual	ifikasi Pendi	dikan			
			Formasi	Forma	si Hukum	Forn	nasi S-2	F	ormasi	Umum	
No	Kode Penempatan	Unit Kerja	Calas	Jumlah	Program Studi	Jumlah	Program Studi	Jumlah	Stu	Program ıdi/Rumpun Keilmuan	KETERANGAN
1	PUSAT – KU I	Keasistenan Utama I Peradilan, Keimigrasian, Lembaga Permasyarakatan, Hak Sipil dan Politik, Hak Kekayaan Intelektual	4	2	S-1/D-IV Hukum	1	S-2 Hukum	1	S-1/	D-IV Ekonomi	Formasi Umum untuk subrumpun Ekonomi sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46/B/HK/2019
2	PUSAT – KU II	Keasistenan Utama II Kepolisian, Kejaksaan, Pertahanan, Kedaruratan	5	2	S-1/D-IV Hukum	2	S-2 Hukum	1	S-1	/D-IV Teknik Geologi	Formasi Umum untuk program studi Teknik Geologi
3	PUSAT – KU III	Keasistenan Utama III Perdagangan, Industri dan Logistik, Pertanian, Pangan, Perikanan, Penanaman	5	2	S-1/D-IV Hukum	1	S-2 Hukum	2	1	S-1/D-IV Ilmu Pertanian	Formasi Umum untuk rumpun Ilmu Pertanian sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46/B/HK/2019
3	FUSAT - KU III	Modal, Pajak, Bea dan Cukai, Perbankan, Perizinan, Asuransi, Pegadaian, Pengadaan Barang Jasa dan Lelang, Koperasi	5	2	(dengan peminatan Perdata)	I	3-2 mukum	2	1	S-1/D-IV Ekonomi	Formasi Umum untuk subrumpun Ekonomi sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46/B/HK/2019

						Kual	ifikasi Pendi	dikan			
			Formasi	Formas	i Hukum	Form	nasi S-2	j.	ormasi	Umum	
No	Kode Penempatan	Unit Kerja	Calas	Jumlah	Program Studi	Jumlah	Program Studi	Jumlah	Stı	Program ıdi/Rumpun Keilmuan	KETERANGAN
4	PUSAT – KU IV	Keasistenan Utama IV Agraria, Pemukiman dan Perumahan, Transmigrasi	4	1	S-1/D-IV Hukum (dengan peminatan	1	S-2 Hukum	2	1	S-1/D-IV Administrasi Pemerintahan/ S-1/D-IV Administrasi Negara	Formasi Umum untuk program studi Administrasi Pemerintahan atau Administrasi Negara
		_			Agraria)				1	S-1 Teknik Geodesi	Formasi Umum untuk program studi S-1 Teknik Geodesi
5	PUSAT – KU V	Keasistenan Utama V Pertambangan, Energi dan Kelistrikan, Air, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Perhubungan dan Infrastruktur, Telekomunikasi dan Informatika	6			1	S-2 Lingkungan Hidup/ S-2 Hukum/ S-2 Administrasi Publik		Perikan Kelauta Pertam Ekonon Teknik/ Transp Adminis Pemeri Adminis Publik/	Manajemen ortasi/ S-1 strasi ntahan/	Formasi Umum untuk program studi Hukum atau Perikanan atau Ilmu Kelautan atau Teknik Pertambangan atau Ekonomi atau Teknik/Manajemen Transportasi atau Administrasi Pemerintahan/Administrasi Publik/Administrasi Negara atau Kehutanan
									1	S-1/D-IV Kesejahteraan Sosial	Formasi Umum untuk program studi Kesejahteraan Sosial
6	PUSAT – KU VI	Keasistenan Utama VI Ketenagakerjaan, Kepegawaian, Jaminan Sosial	4	1	S-1/D-IV Hukum	1	S-2 Administrasi Publik	2	1	S-1/D-IV Ekonomi	Formasi Umum untuk subrumpun Ekonomi sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46/B/HK/2019

						Kual	ifikasi Pendi	dikan			
			Formasi	Formas	i Hukum	Form	nasi S-2	F	ormasi	Umum	
No	Kode Penempatan	Unit Kerja	Calas	Jumlah	Program Studi	Jumlah	Program Studi	Jumlah	Stu	Program ıdi/Rumpun Keilmuan	KETERANGAN
									1	S-1/D-IV Administrasi Pemerintahan	Formasi Umum untuk program studi Administrasi Pemerintahan
7	7 PUSAT – KU VII	Keasistenan Utama VII Pedesaan, Pendidikan, Kesehatan, Administrasi Kependudukan, Keagamaan, Kesejahteraan Sosial	5	1	S-1/D-IV Hukum	1	S-2 Hukum	3	1	S-1/D-IV Rumpun Kesehatan	Formasi Umum untuk subrumpun Kesehatan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46/B/HK/2019
									1		Formasi Umum untuk program studi Antropologi atau Agama dan Budaya
									1		Formasi Umum untuk program studi Statistika
8	PUSAT – KU MPM	Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi	5	2	S-1/D-IV Hukum	1	S-2 Hukum	2	1		Formasi Umum untuk program studi Statistika
									1	S-1/D-IV Administrasi Publik	Formasi Umum untuk program studi Administrasi Publik
9	PUSAT – KU RESMON	Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring	4	1	S-1/D-IV Hukum	1	S-2 Hukum	2	1	S-1/D-IV Ekonomi	Formasi Umum untuk subrumpun Ekonomi sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46/B/HK/2019

						Kuali				
			Formasi	Formasi Hukum		Form	Formasi S-2		ormasi Umum	
No	Kode Penempatan	Unit Kerja	Calas	Jumlah	Program Studi	Jumlah	Program Studi	Jumlah	Program Studi/Rumpun Keilmuan	KETERANGAN
10	DIICAI KIIKK	Keasistenan Utama Manajemen Mutu	2	1	S-1/D-IV Hukum		-	1		Formasi Umum untuk program studi Statistika atau Matematika
Jumla	ah		44		16		9		19	

KANTOR PERWAKILAN

No	Kode	Unit Kerja	Formasi	Forma	si Hukum	Form	asi S-2		Form	nasi Umum	KETERANGAN
	Penempatan	·	Calas	Jumlah	Program Studi	Jumlah	Program Studi	Jumlah	Prog	gram Studi/Rumpun Keilmuan	
1	BALI	BALI	3	1	S-1/D-IV Hukum	1	S-2 Hukum	1	S-1/D-	IV Administrasi Negara	Formasi Umum untuk program studi Administrasi Negara
_					S-1/D-IV			_	1	S-1/D-IV Administrasi Publik	Formasi Umum untuk program studi Administrasi Negara
2	BENGKULU	BENGKULU	4	1	Hukum	1	S-2 Hukum	2	1	S-1/D-IV Ilmu Komunikasi/ S-1/D-IV Hubungan Masyarakat	Formasi Umum untuk program studi Ilmu Komunikasi atau Hubungan Masyarakat
3	GORONTALO	GORONTALO	4	1	S-1/D-IV Hukum	1	S-2 Hukum	2	1	S-1/D-IV Sistem Informasi	Formasi Umum untuk program studi Sistem Informasi
					Пикип				1	S-1/D-IV Teknik Informatika	Formasi Umum untuk program studi Teknik Informatika
4	JKT RAYA	JAKARTA RAYA	1	1	S-1/D-IV Hukum						
5	JAMBI	JAMBI	4	3	S-1/D-IV Hukum	1	S-2 Hukum				
6	JATIM	JAWA TIMUR	6	2	S-1/D-IV Hukum	1	S-2 Hukum	3	2	S-1/D-IV Ilmu Pemerintahan/ S-1/D- IV Kebijakan Publik	Formasi Umum untuk program studi Ilmu Pemerintahan atau Kebijakan Publik
					Hukuiii				1	S-1/D-IV Farmasi	Formasi Umum untuk program studi Farmasi
7	KALSEL	KALIMANTAN SELATAN	3	1	S-1/D-IV Hukum	1	S-2 Hukum	1	S-1 P	sikologi/ S-1 Teknologi Informasi	Formasi Umum untuk program studi Psikologi atau Teknologi Informasi

No	Kode	Unit Kerja	Formasi Calas	Forma	si Hukum	Form	asi S-2		Formasi Umum	KETERANGAN
	Penempatan		Galas	Jumlah	Program Studi	Jumlah	Program Studi	Jumlah	Program Studi/Rumpun Keilmuan	
8	KEPRI	KEPULAUAN RIAU	5	2	S-1/D-IV Hukum	1	S-2 Hukum	2	1 Publik/Kebijakan Publik	Formasi Umum untuk program studi Administrasi Publik atau Kebijakan Publik
					Hakam				S-1/D-IV Ilmu 1 Komunikasi / S-1/D-IV s Hubungan Masyarakat H	Formasi Umum untuk program studi Ilmu Komunikasi atau Hubungan Masyakarat
9	LAMPUNG	LAMPUNG	2	1	S-1/D-IV Hukum			1	S-1/D-IV Ekonomi	Formasi Umum untuk subrumpun Ekonomi sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Finggi Republik Indonesia Nomor 46/B/HK/2019
40					S-1/D-IV	,			S-1/D-IV Rumpun Ilmu k Sosial	Formasi Umum untuk rumpun Ilmu Sosial sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Finggi Republik Indonesia Nomor 46/B/HK/2019
10	MALUKU	MALUKU	4	1	Hukum	1	S-2 Hukum	2	1 S-1/D-IV Ekonomi F	Formasi Umum untuk subrumpun Ekonomi sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Finggi Republik Indonesia Nomor 46/B/HK/2019

						Ku	ıalifikasi Per	ndidikan			KETERANGAN
No	Kode	Unit Kerja	Formasi Calas	Forma	si Hukum	Form	asi S-2		Form	nasi Umum	
	Penempatan		Calas	Jumlah	Program Studi	Jumlah	Program Studi	Jumlah	Prog	gram Studi/Rumpun Keilmuan	
11	MALUT	MALUKU UTARA	4	1	S-1/D-IV	1	S-2 Hukum	2	1	S-1/D-IV Rumpun Ilmu Sosial	Formasi Umum untuk rumpun Ilmu Sosial sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46/B/HK/2019
''			4	1	Hukum	'	0-2 Hukum	2	1	S-1/D-IV Ekonomi	Formasi Umum untuk subrumpun Ekonomi sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46/B/HK/2019
12	NTB	NUSA TENGGARA BARAT	1	1	S-1/D-IV Hukum						
13	NTT	NUSA TENGGARA TIMUR	2	2	S-1/D-IV Hukum						
14	PAPUA	PAPUA	4	4	S-1/D-IV	4	C O Hadaana	2	1		Formasi Umum untuk program studi Teknik Informatika atau Ilmu Komunikasi
14	PAPUA	PAPUA	4	1	Hukum	1	1 S-2 Hukum	2	1	S-1/D-IV Administrasi Publik	Formasi Umum untuk program studi Administrasi Publik
15	RIAU	RIAU	2	1	S-1/D-IV Hukum			1	S-1/D-IV Ilmu Politik/ S-1/D-IV Ekonomi		Formasi Umum untuk subrumpun Ekonomi sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46/B/HK/2019

				Kualifikasi Pendidikan						
No	Kode	Unit Kerja	Formasi	Forma	asi Hukum	Form	asi S-2		Formasi Umum	KETERANGAN
	Penempatan		Calas	Jumlah	Program Studi	Jumlah	Program Studi	Jumlah	Program Studi/Run Keilmuan	pun
16	SULSEL	SULAWESI SELATAN	3	1	S-1/D-IV Hukum	1	S-2 Hukum	1	S-1/D-IV Administrasi	studi Administrasi Negara
									S-1/D-IV Peren Wilayah dan Ko (Planologi) / S- Teknik Geomat	/D-IV
17	SULTENG	SULAWESI TENGAH	6	2	S-1/D-IV Hukum	1	S-2 Hukum	3	1 S-1/D-IV Rump Sosial	Formasi Umum untuk rumpun Ilmu Sosial sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46/B/HK/2019
									1 S-1/D-IV Rump Pendidikan	Formasi Umum untuk rumpun Pendidikan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46/B/HK/2019
18	SULUT	SULAWESI UTARA	5	2	S-1/D-IV Hukum	1	S-2 Hukum	2	1 S-1/D-IV Rump Sosial	Formasi Umum untuk rumpun Ilmu Sosial sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46/B/HK/2019
									1 S-1/D-IV Ekono	mi Formasi Umum untuk subrumpun Ekonomi sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor

		Unit Kerja	Formasi Calas								
No	Kode			Formasi Hukum		Form	asi S-2		Forn	nasi Umum	KETERANGAN
	Penempatan			Jumlah	Program Studi	Jumlah	Program Studi	Jumlah	Pro	gram Studi/Rumpun Keilmuan	
											46/B/HK/2019
19	SUMSEL	SUMATERA SELATAN 5 2 S-1/D-IV 1 S-2 Hukum 1	S-2 Hukum	2	1	S-1/D-IV Ilmu Komunikasi/ S-1/D-IV Jurnalistik	Formasi Umum untuk program studi Ilmu Komunikasi atau Jurnalistik				
					Hukum				1	S-1/D-IV Perbankan	Formasi Umum untuk program studi Perbankan
20	SUMUT	SUMATERA UTARA	3	1	S-1/D-IV Hukum	1	S-2 Hukum	1	S-1/	D-IV Ilmu Komunikasi	Formasi Umum untuk program studi Ilmu Komunikasi
Jumlah	lumlah		71	26 17		17	28		28		

Lampiran II Pengumuman Nomor 1 Tahun 2022 Tanggal : 10 Februari 2022

Jadwal Tentatif Seleksi Calon Asisten Ombudsman RI Tahun 2022

No.	Kegiatan	Waktu	Lokasi	Keterangan
1.	Pengumuman Pendaftaran	10 Februari 2022		Melalui situs Ombudsman RI
2.	Pendaftaran	14 Februari 2022 - 7 Maret 2022		Online
3.	Seleksi Administrasi	15 Februari 2022 - 9 Maret 2022		Online
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	10 Maret 2022		Melalui situs Ombudsman RI
5.	Masa Sanggah Seleksi Administrasi	11 - 14 Maret 2022		
6.	Jawaban Sanggah Seleksi Administrasi	12 – 16 Maret 2022		
7.	Pengumuman Hasil Sanggah Seleksi Administrasi	17 Maret 2022		
8.	Ujian Tertulis	28 Maret 2022	Pelaksanaan di Kantor BKN/Kanreg/UPT BKN	Online
9.	Pengumuman Hasil Ujian Tertulis	1 April 2022		Melalui situs Ombudsman RI

No.	Kegiatan	Waktu	Lokasi	Keterangan
10.	Psikotes	6- 7 April 2022	Pelaksanaan di tempat masing- masing peserta	Online
11.	Pengumuman Hasil Psikotes	25 April 2022		Melalui situs Ombudsman RI
12.	Tes Kesehatan	9 - 10 Mei 2022	RS/RSUD Pemerintah	
13.	Pengumuman Hasil Tes Kesehatan	18 Mei 2022		Melalui situs Ombudsman RI
14.	Ujian Wawancara	23 - 25 Mei 2022	Pelaksanaan di tempat masing- masing peserta	Online
15.	Pengumuman Hasil Seleksi Calon Asisten	31 Mei 2022		Melalui situs Ombudsman RI

^{*}Perubahan jadwal sewaktu-waktu akan diumumkan melalui website www.ombudsman.go.id